

PENGUATAN KETERLIBATAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA MELALUI KEBIJAKAN DI DESA GADINGSARI, KABUPATEN BONDOWOSO

Nadiya Amalia Putri¹, Rizka Ramadhani², Ria Angin³

Email: nadiya.amalia.putri@gmail.com¹, rmdhnrzx940@gmail.com²,
ria.angin@unmuhjember.ac.id³

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dan memahami bagaimana kebijakan terhadap pemilih baru dapat meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu di Desa Gadingsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Pemilih pemula merupakan kelompok yang penting karena merupakan generasi baru yang berpotensi berperan aktif dalam proses demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data analisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengetahui pola pemilih pemula. Temuan kami menunjukkan bahwa langkah-langkah khusus untuk pemilih pemula mempunyai dampak positif terhadap peningkatan jumlah pemilih. Untuk pertama kalinya, elemen-elemen seperti pendidikan kewarganegaraan, keterlibatan melalui aksi sosial, dan program penjangkauan oleh pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah (LSM) diidentifikasi sebagai hal yang penting untuk menarik perhatian pemilih. Pemilih baru di Desa Gadingsari cenderung lebih sadar politik ketika mengikuti diskusi interaktif terkait kehidupan sehari-hari. Program penjangkauan yang melibatkan tokoh masyarakat setempat juga meningkatkan minat dan kemauan pemilih pemula untuk berpartisipasi. Berkat upaya edukasi yang efektif, Desa Gadingsari mencatat peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu pertama dibandingkan bertahun-tahun sebelumnya. Studi ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat upaya penjangkauan dan mengembangkan kebijakan yang mendukung keterlibatan pemilih pemula di tingkat desa guna memperkuat demokrasi yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Pemilih Pemula, Keterlibatan Politik, Partisipasi Pemilu, Kebijakan Pemerintah.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan publik serta memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka. Pemilu tidak hanya berfungsi untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai media bagi masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat, terutama pemilih pemula, memegang peranan penting dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. Pemilih pemula, yang berusia antara 17 hingga 21 tahun, adalah kelompok strategis yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap proses politik di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi mereka dalam pemilu menunjukkan penurunan yang signifikan (Wijayanti, 2021). Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2024, meskipun jumlah pemilih pemula terus meningkat, tingkat partisipasi mereka masih rendah. KPU mencatat bahwa hanya sekitar 30% dari pemilih pemula yang benar-benar menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Fenomena ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi politik di kalangan generasi muda, khususnya pemilih pemula (Indriani, 2023; KPU, 2024). Penurunan partisipasi ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman mereka tentang politik, sikap apatis terhadap politik, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan politik yang memadai (Wijayanti, 2021; Sari, 2022).

Partisipasi politik merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi pemilih pemula perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Pemilih pemula adalah generasi yang akan menentukan arah masa depan politik dan kebijakan publik. Penelitian oleh Mulyani (2021) menyatakan bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, diperlukan pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang lebih komprehensif, serta sosialisasi politik yang disesuaikan dengan karakteristik dan preferensi generasi muda. Selain itu, pendidikan politik yang terbuka, berbasis media yang relevan, dan disertai dengan interaksi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat memotivasi pemilih pemula untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilu (Suryani, 2022).

Studi ini fokus pada Desa Gadingsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, yang menjadi contoh daerah dengan rendahnya partisipasi pemilih pemula meskipun telah ada berbagai inisiatif dan program pendidikan politik yang dilaksanakan. Menurut Wahyudi (2023), program-program tersebut belum berhasil menjangkau dan melibatkan pemilih pemula secara maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi ini antara lain terbatasnya akses informasi politik yang relevan, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pemilu, dan pendekatan sosialisasi yang kurang sesuai dengan karakteristik pemilih muda di daerah pedesaan (Haryono, 2021). Menurut data KPU (2023), meskipun jumlah pemilih pemula terus meningkat pada setiap pemilu, tingkat partisipasi mereka tetap lebih rendah dibandingkan dengan kelompok pemilih lainnya. Pada Pemilu 2024, diperkirakan pemilih pemula akan mencakup sekitar 15-20% dari total pemilih nasional (KPU, 2023). Ini menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki potensi besar untuk mempengaruhi hasil pemilu, namun mereka masih ragu untuk terlibat aktif dalam proses politik. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang dampak suara mereka terhadap hasil pemilu, serta ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada (Sari, 2022). Di Desa Gadingsari, meskipun berbagai inisiatif pendidikan politik telah diterapkan, seperti kampanye pemilu dan program sosialisasi, rendahnya partisipasi pemilih pemula tetap menjadi masalah yang signifikan. Faktor sosial ekonomi dan budaya di daerah ini juga mempengaruhi sejauh mana pemilih pemula dapat terlibat dalam proses pemilu. Haryono (2021) menyebutkan bahwa pemilih pemula di desa ini sering kali merasa bahwa proses politik dan pemilu tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini diperburuk oleh kurangnya akses informasi yang dapat dipahami dengan mudah dan relevansi kampanye politik yang ada.

Pendidikan politik yang efektif dan inklusif menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Penelitian oleh Suryani (2022) menunjukkan bahwa pendidikan politik yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga melibatkan pengalaman praktis, seperti simulasi pemilu atau diskusi kelompok, dapat lebih menarik minat pemilih pemula untuk berpartisipasi. Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi juga terbukti efektif dalam menjangkau generasi muda, mengingat karakteristik mereka yang lebih familiar dengan platform digital (Pratama, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan di Desa

Gadingsari untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas berbagai program pendidikan politik dan kampanye yang telah dilakukan di desa ini. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula, serta bagaimana kebijakan yang ada dapat dioptimalkan untuk lebih mendorong keterlibatan mereka dalam pemilu. Dengan mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh pemilih pemula di Desa Gadingsari, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan dapat diterapkan di desa ini maupun di daerah lainnya yang menghadapi permasalahan serupa. Selain itu, hasil penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu untuk merumuskan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula di masa depan. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan demokrasi di Indonesia, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan politik yang mencerminkan suara generasi muda yang akan mempengaruhi masa depan bangsa.

METODE

Penelitian ini berlokasi di Desa Gadingsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, dengan fokus pada analisis partisipasi politik pemilih pemula. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena partisipasi pemilih pemula dalam pemilu, terutama di kalangan pelajar di dua sekolah menengah atas di daerah tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuannya adalah untuk mengeksplorasi pemahaman subjektif dan pengalaman individu serta kelompok mengenai partisipasi politik mereka dalam pemilu. Menurut Silverman (2020), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia melalui data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Penelitian ini menekankan pada analisis data deskriptif yang dapat menggambarkan kompleksitas pola, makna, dan situasi sosial yang terjadi di lapangan.

Pendekatan kualitatif juga memiliki karakteristik eksploratif dan adaptif, yang memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan metode pengumpulan data sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Seperti yang diungkapkan oleh Patton (2019), fleksibilitas dalam desain penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi situasi secara langsung dan lebih memahami konteks, makna, serta pengalaman para partisipan.

Populasi dan Sampel

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang memenuhi kriteria sebagai pemilih pemula di SMKN 1 Bondowoso dan SMAN 1 Tenggarang, yaitu siswa yang telah berusia 17 tahun atau akan mencapai usia 17 tahun dalam waktu dekat dan memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, populasi penelitian mencakup siswa kelas 12 dan sebagian siswa kelas 11 yang sudah memenuhi persyaratan usia. Pada penelitian ini, sampel yang diambil adalah 40 siswa dari SMKN 1 Bondowoso dan 30 siswa dari SMAN 1 Tenggarang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling (sampling bertujuan), yaitu teknik di mana peneliti memilih sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Purposive sampling digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang diambil benar-benar mewakili fenomena yang diteliti, dalam hal ini partisipasi pemilih pemula. Kriteria

pemilih pemula yang dipilih adalah siswa yang telah berusia 17 tahun atau akan mencapai usia tersebut dalam waktu dekat, menunjukkan minat pada politik, dan terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan atau komunitas seperti OSIS. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dan menggambarkan persepsi serta pengalaman mereka terkait pemilu (Arikunto, 2021).

Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang mendalam dan komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode utama dalam penelitian kualitatif ini, yang dilakukan secara langsung dengan para pemilih pemula untuk memperoleh pemahaman tentang persepsi, pengalaman, dan sikap mereka terhadap proses pemilu. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka, seperti tingkat pemahaman mereka terhadap proses demokrasi, sikap terhadap politik, serta hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam berpartisipasi dalam pemilu. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk fleksibel dalam menggali informasi tambahan sesuai dengan respons yang diberikan oleh partisipan (Sugiyono, 2020). Wawancara ini juga bertujuan untuk memperoleh data subjektif mengenai perasaan dan pendapat individu yang tidak dapat diukur dengan metode kuantitatif.

2. Observasi

Observasi merupakan metode lain yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data langsung dari lingkungan atau situasi yang diteliti. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih otentik mengenai perilaku, interaksi sosial, dan situasi tertentu di dunia nyata tanpa manipulasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap kegiatan politik di sekitar sekolah, seperti diskusi tentang pemilu, kampanye pendidikan pemilih, dan interaksi antara siswa dengan organisasi politik. Observasi ini juga dilakukan di luar kelas, untuk memahami bagaimana pemilih pemula mendiskusikan atau terlibat dalam percakapan politik informal dengan teman-teman atau keluarga mereka.

3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, analisis dokumen juga digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dokumen yang dianalisis termasuk materi pendidikan politik yang diberikan di sekolah, hasil kampanye politik yang dilakukan, dan laporan terkait pemilu. Dokumentasi ini memberikan wawasan tambahan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, serta bagaimana program-program ini diterima oleh mereka.

Validitas Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu penggunaan berbagai metode dan sumber data yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian. Menurut Patton (2019), triangulasi memungkinkan peneliti untuk mengonfirmasi hasil penelitian dengan menggabungkan berbagai perspektif, yang pada gilirannya meningkatkan keandalan dan validitas temuan. Selain itu, peneliti juga melibatkan anggota kelompok untuk melakukan pengecekan kembali terhadap temuan untuk memastikan bahwa interpretasi dan analisis yang dilakukan akurat dan sesuai dengan pandangan para partisipan.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis secara tematik. Analisis tematik adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema yang muncul dari data kualitatif (Silverman, 2020). Proses ini dilakukan secara iteratif, dengan peneliti secara terus-menerus memeriksa data dan kategori yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah tema-tema utama diidentifikasi, temuan tersebut diorganisasikan dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di Desa Gadingsari.

Etika Penelitian

Penelitian ini mengikuti prinsip-prinsip etika yang ketat, dengan memperoleh izin dari pihak terkait, seperti kepala sekolah dan komite etika penelitian. Seluruh partisipan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan hak-hak mereka, termasuk hak untuk merahasiakan identitas dan informasi pribadi mereka. Peneliti juga memastikan bahwa data yang dikumpulkan akan digunakan hanya untuk tujuan akademik dan dijaga kerahasiaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Edukasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula

Pendidikan kewarganegaraan bagi pemilih pemula di tingkat sekolah memiliki tujuan penting dalam meningkatkan partisipasi politik mereka dalam proses demokrasi. Partisipasi politik yang aktif dapat mengarah pada pembentukan pemilih yang kritis dan berpengetahuan. Andriani et al. (2020) menyatakan bahwa pendidikan pemilih bagi pemula di sekolah memberikan pemahaman yang mendalam tentang politik dan membantu siswa dalam membuat keputusan yang rasional dalam pemilu. Pendidikan pemilih bagi pemilih pemula merupakan elemen dasar dalam membangun partisipasi aktif dalam proses demokrasi, terutama bagi generasi muda yang baru memasuki dunia politik. Pemilih pemula perlu memahami mekanisme pemilu, hak-hak mereka, serta tanggung jawab yang dimiliki sebagai pemilih. Tanpa pemahaman ini, mereka berisiko jatuh pada sikap apatis terhadap politik dan cenderung membuat keputusan yang kurang rasional (Rahmawati & Setiawan, 2020).

Pendidikan pemilih membantu pemilih pemula untuk memahami proses demokrasi dan memfasilitasi mereka dalam membuat keputusan politik yang lebih cerdas. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Setiawan (2020) menunjukkan bahwa pemilih baru yang memiliki latar belakang pendidikan politik yang baik lebih mampu menilai calon pemimpin berdasarkan kualitas mereka, daripada sekadar popularitas atau pengaruh lingkungan. Pendidikan pemilih di daerah seperti Desa Gadingsari di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, dapat menjadi strategi efektif untuk memberikan informasi awal kepada pemilih pemula mengenai hak-hak mereka dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Kegiatan seperti simulasi pemilu, debat publik, serta pelatihan keterampilan politik dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan diri pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih mereka (Ismail, 2022).

Namun, sikap apatis dan ketidakpedulian politik sering kali terjadi di kalangan pemilih pemula yang kurang memahami pentingnya partisipasi mereka dalam sistem demokrasi. Hidayat dan Ramadhan (2022) menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan di tingkat sekolah dapat menurunkan tingkat apatisisme politik dan meningkatkan minat siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Konsep ini

diperkuat oleh teori demokrasi yang diajukan oleh Dahl (2020), yang menegaskan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif seluruh warga negara. Dalam konteks ini, pendidikan pemilih memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan keterampilan politik pemilih pemula, sekaligus memberikan mereka akses informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan politik yang bijaksana dan independen. Di samping manfaat jangka pendek, pendidikan pemilih juga berkontribusi pada terciptanya pemilih yang lebih berkualitas di masa depan. Studi yang dilakukan oleh Kusuma (2023) mengungkapkan bahwa pemilih pemula yang mendapat pelatihan politik sejak usia muda cenderung berkembang menjadi pemilih yang lebih kritis, terbuka, dan partisipatif sepanjang hidup mereka. Dengan demikian, pendidikan pemilih tidak hanya mendidik pemilih untuk memahami proses politik dan sistem pemilu, tetapi juga membentuk karakter pemilih yang aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik mereka.

Pendidikan pemilih juga penting untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang sistem politik, fungsi lembaga negara, dan peran serta tanggung jawab warga negara. Di wilayah pedesaan seperti Desa Gadingsari, pendidikan pemilih menjadi semakin krusial, mengingat terbatasnya akses terhadap informasi politik dan literasi politik di sana. Dahl (2020) menyatakan bahwa akses terhadap informasi yang akurat dan adil merupakan salah satu aspek utama dalam menciptakan keputusan politik yang rasional dan tepat. Tanpa pendidikan yang memadai, pemilih pemula rentan terhadap pengaruh informasi yang tidak akurat atau bias yang dapat merugikan proses demokrasi. Pendidikan politik sejak dini terbukti dapat meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam pemilu. Rahayu dan Anwar (2021) mengungkapkan bahwa pemilih muda yang memperoleh pendidikan pemilih memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam pemilu, terutama dalam hal pemahaman terhadap isu-isu kebijakan publik. Selain itu, pelatihan pemilih juga efektif dalam mengurangi sikap apatis politik. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2022) menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan pendidikan politik di sekolah lebih kritis terhadap isu politik dan lebih termotivasi untuk menggunakan hak pilih mereka dengan bijaksana.

Di era digital saat ini, pemilih pemula sering kali terpapar pada misinformasi yang dapat memengaruhi keputusan politik mereka. Pendidikan pemilih yang mencakup literasi digital dapat membantu pemilih muda membedakan informasi yang valid dari berita palsu. Maulana dan Sali (2023) menunjukkan bahwa pemilih yang melek digital lebih mampu mengenali informasi yang benar dan menghindari berita yang menyesatkan, yang pada gilirannya mengurangi dampak negatif misinformasi terhadap keputusan politik mereka. Pendidikan pemilih juga penting untuk mempersiapkan pemilih pemula agar dapat menjadi pemilih yang lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politik mereka. Hal ini sangat penting untuk mengembangkan pemimpin yang berkualitas dan memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat. Kusuma (2023) menyatakan bahwa pemilih pemula yang teredukasi memiliki kemampuan berpikir kritis yang memungkinkan mereka untuk menilai calon politik dan kebijakan secara objektif, yang berkontribusi pada kemajuan demokrasi itu sendiri. Dari perspektif teoritis, pendidikan pemilih diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemilih pemula tentang konsep-konsep demokrasi dan membantu mengurangi apatisisme politik di kalangan mereka. Hal ini sangat relevan untuk menciptakan partisipasi politik yang lebih inklusif, terutama di daerah dengan tingkat partisipasi yang relatif rendah. Oleh karena itu, pendidikan pemilih merupakan elemen kunci dalam mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dan memperkuat demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional (Dahl, 2020).

Peran Sekolah Dalam Mempersiapkan Pemilih Pemula

Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk membentuk pemilih yang sadar politik. Sebagai contoh, SMKN 1 Bondowoso dan SMAN 1 Tenggarang dapat menyelenggarakan pendidikan pemilih melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai demokrasi, hak-hak kewarganegaraan, serta mekanisme partisipasi politik dalam sistem demokrasi (Heriyanto, 2021). Mata pelajaran ini berfungsi sebagai wahana untuk menanamkan kesadaran politik dan meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya hak pilih sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.

Teori demokrasi yang dikemukakan oleh Robert Dahl, yang dikenal dengan konsep "polyarchy," menegaskan bahwa pendidikan merupakan elemen vital dalam menciptakan warga negara yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Menurut Dahl (2020), pendidikan di negara demokratis harus mampu memastikan kebebasan berekspresi, memberikan akses informasi yang setara, serta mendorong kesetaraan politik, yang kesemuanya merupakan syarat mutlak untuk tercapainya demokrasi yang efektif. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran strategis dalam menyediakan ruang bagi warga negara muda untuk memperoleh pengetahuan politik yang mendalam dan mengembangkan sikap partisipatif. Pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah memberikan pemahaman dasar tentang hak memilih, cara kerja sistem politik, dan kewajiban warga negara dalam memilih secara rasional.

Melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sekolah tidak hanya mengajarkan dasar-dasar sistem politik, tetapi juga mengedukasi siswa mengenai hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Pendidikan ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya partisipasi pemilih dalam sistem demokrasi. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Setiawan (2021) mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih pemula di Indonesia (Wahyuni & Setiawan, 2021). Selain itu, sekolah berfungsi sebagai ruang yang mendorong pemikiran kritis dan sikap partisipatif di kalangan pemilih pemula melalui kegiatan diskusi, debat, dan simulasi pemilu. Dalam kegiatan ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis terhadap isu-isu politik dan mengambil keputusan secara mandiri. Konsep yang diajukan oleh Dahl (2020) mengenai demokrasi yang sehat menggarisbawahi pentingnya kebebasan berekspresi dan kemampuan untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan kritis sebagai syarat untuk memperkuat demokrasi. Oleh karena itu, lingkungan sekolah yang mendukung kebebasan berbicara dan berpikir kritis sangat penting dalam mempersiapkan siswa menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.

Sejumlah sekolah juga melaksanakan simulasi pemilu sebagai bagian dari pembelajaran aktif yang mendekatkan siswa dengan proses pemilu. Kegiatan ini, yang mencakup kampanye, debat, dan pemungutan suara, memberi siswa kesempatan untuk memperoleh pengalaman langsung mengenai mekanisme pemilu. Widodo (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa simulasi pemilu efektif meningkatkan pemahaman praktis siswa mengenai hak pilih mereka dan berkontribusi pada peningkatan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu yang sesungguhnya (Widodo, 2022).

Sekolah juga sering kali berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelenggarakan sosialisasi tentang pemilu, hak memilih, dan pentingnya pemilu yang bebas dan adil. Kegiatan sosialisasi ini memperkuat pemahaman siswa bahwa suara mereka sangat berpengaruh dalam memilih pemimpin yang akan memengaruhi kebijakan publik. Penelitian Firdaus (2023)

menyimpulkan bahwa sosialisasi semacam ini berkontribusi pada peningkatan pemahaman siswa tentang sistem pemilu serta mendorong mereka untuk menggunakan hak pilih mereka dengan bijak (Firdaus, 2023). Dengan semakin berkembangnya peran media sosial dalam menyebarkan informasi, sekolah juga berperan sebagai sumber informasi yang akurat dan netral bagi pemilih pemula. Akses informasi yang benar dan seimbang merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang sehat, yang dapat membantu pemilih dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang valid dan terpercaya (Dahl, 2020). Melalui integrasi literasi media dalam kurikulum, sekolah dapat mengajarkan pemilih pemula untuk menyaring informasi yang dapat dipercaya dan memotivasi mereka untuk mencari data yang valid sebelum membuat keputusan politik.

Selain itu, sekolah dapat memperkenalkan isu-isu sosial dan lingkungan dalam pendidikan kewarganegaraan guna meningkatkan kesadaran siswa terhadap masalah yang relevan dalam masyarakat. Ketika siswa memahami isu-isu tersebut, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan tujuan menyampaikan solusi terhadap permasalahan yang ada, baik itu isu lingkungan, ekonomi, atau pemerintahan daerah. Dahl (2020) menegaskan bahwa demokrasi hanya akan berjalan efektif apabila warga negara memiliki kesadaran terhadap isu-isu yang mereka hadapi dan memahami dampak keputusan politik terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan yang melibatkan isu sosial dan lingkungan memiliki peran penting dalam mempersiapkan pemilih pemula yang dapat membuat keputusan politik yang bertanggung jawab.

Literasi politik dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pilar demokrasi yang inklusif dan berkualitas: Perspektif Teori Demokrasi Robert Dahl

Literasi politik merupakan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang relevan dengan kebijakan publik, serta berperan aktif dalam proses politik. Sebagai komponen integral dari pendidikan kewarganegaraan, literasi politik memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman dan kesadaran demokrasi, khususnya di kalangan pemilih pemula, seperti pelajar. Melalui pendidikan kewarganegaraan, diharapkan pemilih yang belum berpengalaman dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam demokrasi, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik, terutama dalam pemilu. Pendidikan kewarganegaraan yang baik tidak hanya memberikan pemahaman dasar tentang mekanisme demokrasi, tetapi juga meningkatkan kompetensi politik dan memperkuat kesadaran demokratis di kalangan masyarakat, termasuk pemilih pemula (Dahl, 2020).

Pemilih yang memiliki pemahaman politik yang baik lebih cenderung menyadari pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu. Penelitian Rahmawati (2022) mengenai pengaruh kompetensi politik terhadap partisipasi pemilih baru di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa kegiatan seperti simulasi pemilu, diskusi kelompok, dan pelatihan tentang hak-hak pemilih dapat secara signifikan meningkatkan kompetensi politik dan kesiapan pemilih baru untuk berpartisipasi secara aktif. Hal ini menunjukkan bahwa literasi politik bukan hanya tentang pengetahuan semata, tetapi juga tentang membangun kesadaran kritis yang mendorong tindakan aktif dalam proses politik (Rahmawati, 2022).

Teori demokrasi Robert Dahl memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami pentingnya pendidikan politik dalam konteks pembangunan kesadaran demokrasi. Dahl (2020) menekankan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi politik yang terinformasi, kebebasan berekspresi, dan akses yang setara terhadap informasi sebagai prasyarat bagi warga negara. Dalam kerangka teori ini, literasi politik berperan penting dalam memberi kesempatan kepada individu, khususnya siswa,

untuk memahami hak-hak demokrasinya dan mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, termasuk pemilu. Dengan demikian, literasi politik tidak hanya memperkaya pemahaman warga negara mengenai sistem politik, tetapi juga memperkuat komitmen mereka untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan politik yang lebih luas (Dahl, 2020). Lebih jauh lagi, literasi politik memberikan siswa pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam konteks demokrasi. Menurut teori Dahl, kesetaraan politik dan kesetaraan akses terhadap informasi adalah unsur-unsur utama yang menyusun demokrasi yang sehat. Pemilih yang memiliki kompetensi politik yang baik akan lebih sadar akan hak pilihnya, serta memahami bahwa setiap suara memiliki dampak langsung terhadap hasil pemilu dan proses politik secara keseluruhan. Di tingkat lokal, seperti di Desa Gadingsari, peningkatan literasi politik di kalangan siswa memungkinkan mereka untuk lebih memahami peran dan kontribusi mereka terhadap demokrasi. Hal ini berpotensi meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik mereka, yang pada gilirannya dapat memperkuat demokrasi di tingkat lokal (Dahl, 2020).

Literasi politik juga mencakup kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi isu-isu politik dan kebijakan publik. Dahl (2020) menekankan bahwa kebebasan berpikir dan berbicara kritis adalah pilar utama dari demokrasi yang efektif. Pemilih yang memiliki kemampuan politik yang baik tidak hanya akan mampu memahami permasalahan politik, tetapi juga dapat mengevaluasi dan membedakan informasi yang akurat dan bias. Di Desa Gadingsari, hal ini sangat penting karena memungkinkan pemilih yang kurang berpengalaman untuk menjadi pemilih yang cerdas yang mampu menilai kebijakan dan komitmen politik calon pemimpin sebelum mengambil keputusan pemilu. Oleh karena itu, penguatan literasi politik di kalangan siswa menjadi kunci untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab (Dahl, 2020).

Salah satu tantangan besar dalam politik modern adalah maraknya berita palsu dan disinformasi yang dapat mempengaruhi pandangan politik pemilih, terutama pemilih pemula. Pengetahuan politik yang baik memungkinkan siswa untuk mengevaluasi sumber informasi dengan lebih teliti dan menolak informasi yang tidak dapat dipercaya. Dahl (2020) menekankan bahwa akses terhadap informasi yang akurat adalah prasyarat bagi keberhasilan demokrasi, karena tanpa informasi yang benar, keputusan politik masyarakat bisa terdistorsi dan mengarah pada hasil yang tidak akurat. Oleh karena itu, pendidikan politik yang baik sangat penting untuk membantu pemilih baru, terutama di Desa Gadingsari, mengembangkan cara pandang politik yang lebih objektif dan terinformasi (Dahl, 2020).

Lebih jauh, literasi politik juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap permasalahan sosial dan politik di lingkungan sekitarnya. Teori Dahl menegaskan pentingnya pemahaman terhadap konteks sosial sebagai dasar untuk partisipasi politik yang bermakna. Dengan meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu-isu sosial di Desa Gadingsari, seperti ekonomi lokal, lingkungan hidup, dan masalah kesejahteraan sosial, mereka didorong untuk berpartisipasi dalam pemilu dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memahami hak-hak individu, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat solidaritas sosial dan mendorong partisipasi yang konstruktif dalam kehidupan politik (Dahl, 2020). Sehingga, literasi politik juga berperan dalam membentuk pemahaman siswa mengenai nilai-nilai demokrasi yang fundamental, seperti toleransi, kebebasan berekspresi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Nilai-nilai ini sangat penting untuk mengembangkan warga negara yang dapat berpartisipasi secara

damai dalam proses politik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar. Dahl (2020) berpendapat bahwa elemen-elemen tersebut merupakan inti dari demokrasi yang sehat dan stabil, yang harus dijaga agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik. Pendidikan politik yang efektif dapat membantu siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai ini dan menjadikannya sebagai landasan dalam berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam proses politik.

Dengan demikian, literasi politik memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan nasional. Peningkatan literasi politik di kalangan pemilih pemula, khususnya di desa-desa seperti Gadingsari, dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik yang lebih inklusif dan terinformasi. Pembangunan kesadaran politik yang berbasis pada pemahaman yang mendalam akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta nilai-nilai demokrasi, akan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar, kritis, dan aktif dalam membangun sistem politik yang adil dan berkelanjutan.

Tantangan Pendidikan Pemilih untuk Pemula

Pendidikan pemilih merupakan aspek yang sangat penting dalam membangun kesadaran demokratis, khususnya di kalangan pemilih pemula. Pemilih pemula, seperti pelajar, memegang peranan penting dalam proses demokrasi karena mereka akan menjadi bagian dari keputusan politik di masa depan. Meskipun demikian, meskipun pendidikan pemilih di sekolah memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan partisipasi politik, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitasnya, salah satunya adalah rendahnya minat pelajar terhadap isu politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Iswandi (2023) menunjukkan bahwa banyak siswa cenderung menunjukkan sikap apatis terhadap politik. Hal ini terlihat dalam rendahnya ketertarikan mereka terhadap isu-isu politik dan kebijakan publik yang dianggap tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Iswandi (2023) mencatat bahwa apatisisme politik di kalangan pelajar dapat menjadi hambatan serius dalam upaya meningkatkan kesadaran politik mereka. Siswa yang tidak tertarik dengan politik cenderung enggan untuk terlibat dalam diskusi politik atau kegiatan pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh sekolah.

Fenomena ini tentu saja menjadi tantangan besar bagi institusi pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan terinformasi. Di samping itu, rendahnya minat terhadap politik ini juga disebabkan oleh kesenjangan informasi antara materi pendidikan kewarganegaraan yang disampaikan di sekolah dan kehidupan politik yang dihadapi oleh siswa sehari-hari. Siswa seringkali merasa bahwa isu politik terlalu jauh dari kenyataan hidup mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak menghiraukannya (Iswandi, 2023).

Dalam mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan kreatif yang dapat membuat pendidikan pemilih lebih menarik dan relevan bagi siswa. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti simulasi pemilu, diskusi kelompok, atau penggunaan media sosial untuk mengangkat isu politik yang aktual. Menurut Rahmawati (2022), simulasi pemilu dan diskusi kelompok dapat menjadi cara yang efektif untuk melibatkan siswa dalam proses politik secara langsung. Selain itu, penggunaan teknologi dan media sosial sebagai sarana untuk mengedukasi siswa juga dapat mempercepat pemahaman mereka mengenai politik, serta menjadikannya lebih relevan dengan kehidupan mereka (Rahmawati, 2022). Selain itu, penting untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar politik secara lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Pendekatan ini bisa melalui integrasi materi politik dalam

konteks yang lebih dekat dengan pengalaman mereka, seperti isu-isu sosial, ekonomi, dan budaya yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari. Menurut penelitian oleh Setiawan (2021), mengaitkan pendidikan politik dengan permasalahan sosial yang dihadapi oleh siswa dapat meningkatkan minat dan kesadaran mereka terhadap isu-isu politik, karena siswa akan merasa bahwa politik berhubungan langsung dengan kehidupan mereka.

Penggunaan media massa, termasuk platform digital, juga dapat membantu menarik minat siswa. Media sosial, video pendek, dan infografis bisa menjadi sarana yang lebih efektif dalam menyampaikan informasi politik yang padat dan mudah dipahami. Teknologi ini memungkinkan informasi politik disampaikan dalam format yang lebih menarik, menyenangkan, dan mudah diakses, yang pada gilirannya dapat mengurangi rasa apatis siswa terhadap topik politik (Setiawan, 2021). Dengan pendekatan yang lebih inovatif, pendidikan pemilih untuk pemilih pemula dapat menjadi lebih efektif dalam membangkitkan minat dan partisipasi politik siswa. Tantangan utama dalam pendidikan pemilih untuk pemilih pemula, terutama di kalangan pelajar, adalah bagaimana mengubah sikap apatis menjadi sikap aktif yang mendukung partisipasi politik. Oleh karena itu, sekolah dan pengelola pendidikan harus berkolaborasi untuk mengembangkan metode yang sesuai dengan kebutuhan dan kecenderungan generasi muda saat ini.

Pengaruh Media Sosial dalam Pendidikan Pemilih

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pembentukan pandangan politik, terutama di kalangan pemilih pemula. Di era digital saat ini, media sosial berperan sebagai salah satu sumber utama informasi, termasuk informasi politik. Penggunaan media sosial di kalangan pemilih pemula, terutama generasi muda, semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin mudah. Namun, meskipun media sosial memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi politik, platform ini juga membawa sejumlah tantangan, terutama terkait dengan kualitas informasi yang beredar.

Studi yang dilakukan oleh Auria (2023) mengenai penggunaan media sosial oleh pemilih pemula di Bondowoso menemukan bahwa media sosial merupakan sumber utama informasi politik bagi pemilih baru. Pemilih pemula di daerah tersebut cenderung mengandalkan platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk memperoleh informasi terkait pemilu, kebijakan politik, serta profil calon pemimpin. Fenomena ini tidak terlepas dari tingginya penetrasi teknologi digital di kalangan pelajar dan pemuda, yang membuat media sosial menjadi saluran komunikasi yang efisien dan mudah diakses untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Namun, seperti yang disoroti oleh Auria (2023), meskipun media sosial memberikan kemudahan dalam mengakses informasi politik, ia juga menyimpan potensi risiko, terutama terkait dengan penyebaran berita bohong (hoaks) dan disinformasi. Banyak informasi yang beredar di media sosial tidak melalui proses verifikasi yang ketat, sehingga dapat mempengaruhi pemahaman dan pandangan politik pemilih pemula. Dalam konteks ini, pemilih pemula sering kali tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara informasi yang akurat dan informasi yang bias atau palsu, yang dapat mengarah pada kesalahan dalam pengambilan keputusan politik. Auria (2023) mengungkapkan bahwa pemilih pemula yang hanya mengandalkan media sosial sebagai sumber utama informasi cenderung terpapar pada konten yang tidak terverifikasi, yang dapat memperburuk kualitas pemahaman politik mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial dapat memperluas akses informasi, ia juga berisiko memperkenalkan pemilih muda pada informasi yang menyesatkan atau tidak objektif. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan pemilih untuk mengintegrasikan keterampilan literasi digital sebagai bagian dari kurikulum, sehingga pemilih pemula dapat

mengembangkan kemampuan untuk menyaring informasi yang mereka terima dari media sosial.

Literasi digital ini melibatkan pengajaran mengenai cara untuk mengevaluasi kredibilitas sumber informasi, mengenali hoaks, serta memahami bagaimana algoritma media sosial dapat memengaruhi apa yang dilihat oleh pengguna. Penelitian oleh Fitriani (2021) juga menunjukkan bahwa pendidikan mengenai literasi media sangat penting untuk meningkatkan kesadaran kritis di kalangan pemilih pemula, terutama terkait dengan bagaimana media sosial dapat membentuk pandangan politik dan opini publik. Fitriani (2021) menambahkan bahwa keterampilan digital ini tidak hanya memungkinkan pemilih untuk menyaring informasi yang salah, tetapi juga membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu politik dan pemilu yang relevan. Lebih lanjut, literasi digital dalam pendidikan pemilih dapat membantu pemilih pemula untuk menghindari jebakan disinformasi yang sering beredar di media sosial. Pembelajaran mengenai cara menilai sumber informasi, mengecek fakta, serta memahami bias yang ada dalam berita atau konten yang dibagikan di platform digital, menjadi keterampilan yang sangat diperlukan untuk menjadi pemilih yang terinformasi dan bertanggung jawab (Setiawan, 2020).

Pendidikan pemilih yang berbasis pada keterampilan literasi digital dapat membantu mengurangi risiko penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat mempengaruhi proses pemilu. Oleh karena itu, mengajarkan keterampilan digital harus menjadi bagian dari upaya pendidikan pemilih yang lebih luas, dengan tujuan tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi politik, tetapi juga untuk memastikan bahwa partisipasi tersebut berdasarkan pada informasi yang akurat dan kredibel.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan di Desa Gadingsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, mengungkapkan pentingnya penguatan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu sebagai elemen krusial dalam memperkuat demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Temuan utama dari studi ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis komunitas. Pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan, motivasi, serta tantangan yang dihadapi oleh pemilih pemula menjadi langkah awal yang esensial dalam merancang program politik yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pentingnya pendidikan politik yang inklusif dan akses informasi yang akurat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih muda. Penyuluhan yang tepat dan pemanfaatan berbagai kanal informasi yang mudah diakses dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan politik yang sering kali menjadi hambatan bagi pemilih pemula dalam mengambil keputusan yang berdasarkan informasi yang benar. Selain itu, pelibatan pemilih muda dalam proses politik harus dilakukan dengan cara yang menarik dan relevan dengan realitas sosial mereka, untuk menciptakan rasa kepemilikan terhadap proses demokrasi.

Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan serta program-program yang dapat mendorong keterlibatan pemilih muda secara lebih luas. Strategi yang diusulkan, jika diterapkan secara konsisten, diharapkan dapat membentuk generasi muda yang lebih sadar politik, kritis, dan siap berkontribusi secara aktif dalam proses demokrasi. Dengan demikian, dapat tercapai tujuan untuk memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional, serta menciptakan masyarakat

yang lebih partisipatif dan berdaya. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan partisipasi pemilih pemula bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk membangun ekosistem politik yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, I., Sari, N., & Widodo, W. (2020). Pengaruh Pendidikan Pemilih terhadap Partisipasi Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 15(2), 102-115.
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Auria, F. (2023). Pengaruh media sosial terhadap pandangan politik pemilih pemula di Bondowoso. *Jurnal Pendidikan Politik*, 21(1), 45-60.
- Dahl, R. A. (2020). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Dahl, R. A. (2020). *On Democracy* (2nd ed.). Yale University Press.
- Haryono, S. (2021). *Pemilih Pemula di Desa Gadingsari: Analisis Partisipasi Politik*. Yogyakarta: Jurnal Sosial Politik
- Hidayat, F., & Ramadhan, A. (2022). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Sikap Politik Pemilih Pemula di SMA. *Jurnal Pendidikan dan Politik*, 10(1), 55-67.
- Indriani, A. (2023). *Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Demokrasi.
- Ismail, S. (2022). Pendidikan Politik di Sekolah: Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(3), 125-137.
- Iswandi, D. (2023). Apatisme politik di kalangan pelajar dan tantangan dalam pendidikan pemilih di sekolah. *Jurnal Pendidikan Politik*, 18(2), 120-135.
- KPU. (2023). *Laporan Statistik Pemilu 2024*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KPU. (2024). *Data Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Kusuma, H. (2023). Peran Pendidikan Pemilih dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Pemilih Pemula. *Jurnal Demokrasi dan Politik*, 18(2), 144-160.
- Maulana, M., & Sali, A. (2023). Literasi Digital dan Partisipasi Politik di Kalangan Pemilih Pemula. *Jurnal Komunikasi Politik*, 13(4), 210-223.
- Mulyani, D. (2021). *Pendidikan Politik dan Partisipasi Pemilih Pemula*. Jakarta: Penerbit Pendidikan.
- Patton, M. Q. (2019). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Pratama, S. (2023). *Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula*. Surabaya: Penerbit Media Muda.
- Rahayu, M., & Anwar, R. (2021). Pengaruh Pendidikan Pemilih terhadap Partisipasi Pemilih Muda di Pemilu. *Jurnal Pemilu dan Politik*, 9(3), 81-94.
- Rahmawati, N., & Setiawan, R. (2020). Peran Pendidikan Politik dalam Pembentukan Pemilih Rasional. *Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 97-110.
- Sari, N. (2022). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Indonesia: Hambatan dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Politik.
- Setiawan, F. (2021). Pengaruh pendidikan politik berbasis media sosial terhadap peningkatan partisipasi politik pelajar. *Jurnal Sosial dan Politik*, 14(4), 301-315.
- Silverman, D. (2020). *Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Sugiyono, M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, R. (2022). *Strategi Sosialisasi Pemilu untuk Pemilih Pemula*. Yogyakarta: Penerbit Pemilu.
- Wahyudi, R. (2023). *Evaluasi Program Pendidikan Politik di Desa Gadingsari*. Bondowoso: Lembaga Penelitian Sosial.
- Wijayanti, L. (2021). *Faktor Penyebab Apatisme Pemilih Pemula dalam Pemilu*. Jakarta: Penerbit Ilmu Politik.